

GUNUNG KIDUL SAAT MELETUS PKI MUSO MADIUN

Oleh : Ernawati Purwaningsih

Pada saat meletus pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 Kabupaten Gunung Kidul juga terkena imbasnya. Pada suatu hari sekitar pukul 17.00 tatkala bupati sedang menemui tamu dari Yogyakarta, yaitu K.R.T. Purwokusumo, SH dan rombongan, masuklah kepala Polisi Wonosari dan disusul oleh Sugaib dengan menarik revolver dengan tangan yang gemeteran. Margono, lurah Desa Nglora Paliyan yang akan mengayunkan pedang ethunus, tetapi lalu berdiri mematung saja, demikian juga Hadisukanto yang telah membawa panah dan akan dilepaskannya tetapi juga mematung saja, sedang di luar telah siap kurang lebih pemuda bersenjata *granggang* mengepung rumah Kabupaten Wonosari.

Dalam adegan yang demikian itu, Sugaib menuntut agar bupati memerintahkan kepada polisi melepaskan Istiajid yang ditahan polisi. Setelah bupati memberikan keterangan secukupnya tentang permasalahan, maka suasana ketegangan dapat diredakan dan pengepungan pemuda terhadap rumah kabupaten dibubarkan. Pemuda yang turut mengepung kabupaten akhirnya sadar bahwa diperalat dan tertipu oleh orang-orang PKI. Pengusutan Istiajid berkaitan dengan penggelapan uang koperasi dimana dia menjadi pengurusnya. Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan vonis dihukum kepada yang terlibat. Semula mau naik banding, tetapi belum sampai berlanjut meletuslah pemberontakan PKI Madiun yang disambung dengan Clash II oleh Belanda.

Pada hari Senin malam tanggal 18 September 1948 kepala Polisi Wonosari memberitahukan kepada bupati Gunung Kidul bahwa ia mendapat perintah dari Kepala Polisi Daerah Yogyakarta untuk menjalankan penangkapan kepada orang-orang yang dicurigai berhubungan dengan kudeta di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Setelah Kepala Polisi mengadakan perundingan dengan bupati tentang orang-orang yang harus ditangkap terlebih dahulu, serta mengingat pula alat-alat dan kekuatan yang ada, maka malam itu juga terus dijalankan penangkapan oleh Polisi Wonosari dan dibantu dengan tentara terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya.

Menurut dokumen yang diketahui dari rumah Istiajid, direncanakan pada tanggal 23 September 1948 PKI akan merebut kekuasaan di Wonosari, 24 September 1948 di Pracimantoro, 26 September 1948 di Bantul, 27 September 1948 di Sleman, lalu setelah itu dikonsentrasikan untuk merebut kota Yogyakarta. Selanjutnya BTI telah merencanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1948 akan mengadakan rapat raksasa di Alun-Alun Wonosari yang akan dikunjungi oleh rakyat tani dengan pemudanya yang diperintahkan agar membawa segala macam senjata yang ada dan akan dipimpin oleh Istiajid untuk mengadakan demonstrasi. Rencana tersebut dapat dicegah karena dengan ditangkapnya Istiajid pada malam 19 September 1948. Orang-orang yang waktu itu bertanggung jawab mengadakan rapat raksasa menjadi kebingungan untuk mencabut perintah rapat raksasa yang telah tersebar luas itu.

Pada tanggal 22 September 1948 terdengar berita bahwa pada tanggal 24 September 1948 rumah Jamaah Patuk akan diserbu dan pada malamnya keadaan di Semenu menjadi genting, tetapi berkat kecekatan pihak kepolisian segalanya dapat dicegah dengan selamat. Selanjutnya, tanggal 23 September 1948 didapati berita dengan telepon dari Baron bahwa pada tanggal 21 September 1948 daerah Sukoharjo dan Wonosari telah diduduki oleh Pemerintah Tentara Rakyat (Musu), ebrturut-turut Wuryantoro tanggal 22 September 1948, Baturetno tanggal 23 September 1948, dan Pracimantoro tanggal 24 September 1948.

Di Pracimantoro kelihatan musuh dengan kekuatan tentara bersenjata 40 orang memiliki 2 buah truk yang pada tanggal 25 September 1948 ditambah lagi dengan 20 orang, sehingga di Pracimantoro ada kekuatan 60 orang bersenjata lengkap dan merupakan ancaman bagi daerah Gunung Kidul yang sedang menjalankan pembersihan ke dalam, sedang kekuatan tentara dan polisi waktu itu belum cukup sama sekali untuk menghadapinya. Di sana hanya ada satu seksi kecil tentara dan satu seksi polisi yang bersenjata. Berhubung waktu itu bantuan dari Yogyakarta tidak segera datang, maka hanya dapat menjalankan provokasi ke daerah Pracimantoro dan berkat Tuhan Yang Maha Esa berhasil, sehingga musuh yang semula akan mengadakan penyerbuan ke Wonosari menurut skema yang ada menjadi ragu-ragu dan mengadakan persiapan untuk bertahan.

Pada tanggal 27 September 1948 ada penyelidik musuh dengan naik mobil bersama dua orang bersenjata lengkap dari Pracimantoro menuju Baron ke arah Wonosari juga. Setelah sampai di muka kepolisian mereka ditangkap di Wonosari, mobilnya dapat disita, sedang penyelidiknya segera dikirim ke Yogyakarta untuk diurus lebih lanjut oleh pihak militer.

Keadaan terus menghangat, sedangkan bantuan yang ditunggu dari Yogyakarta tidak datang juga. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi maka rakyat yang dipersenjatai apa adanya didukung oleh orang-orang yang mampu dan sukarela. Pada tanggal 30 September 1948 datang Sri Paduka Paku Alam VIII dengan pengiringnya meninjau keadaan Gunung Kidul, sehingga dengan demikian beliau secara langsung dapat menyaksikan sendiri situasi di Gunung Kidul dan sekitarnya. Beliau berada di Gunung Kidul sampai dengan tanggal 2 Oktober 1948, sebab waktu beliau tiba di Semin lalu ada perintah dari Sri Sultan supaya beliau segera kembali ke Yogyakarta. Panewu (camat) Semin pada waktu itu adalah lurah Wiladeg yang diangkat sebagai percobaan menjalankan tugas Panewu.

Pada tanggal 1 Oktober 1948 siang diadapat kabar dari Semin bahwa di sebelah utara Semin terjadi pertempuran antara tentara hijrah dengan pengacau, dan sore harinya didapati kabar bahwa Manyaran di timur Semin ada kekuatan Tentara Rakyat (PKI Musu) satu kompi dan laskar campuran kurang lebih 800 orang, disusul oleh laporan dari Nglipar yang menerangkan bahwa Panewu Nglipar yang pada waktu akan menghadiri rapat di Kelurahan Tegalrejo diserobot oleh Pemuda Rakyat dari Klaten di bawah pimpinan Kariyosudarmi bekas kepala Jawatan Keamanan Nglipar yang melarikan diri pada waktu diadakan penangkapan para pemimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR) dari PKI oleh Kepolisian Wonosari.

Berhubung adanya peristiwa ini, maka anggota kepolisian yang masih terbatas itu dikirim 10 orang ke Nglipar menjaga keamanan dan ketertiban, sedang mantri Kabupaten Wonosari waktu itu juga dikirim untuk menjelaskan tugas Panewu Nglipar. Peristiwa sebagaimana terjadi di Nglipar juga dialami di tempat lain. Pada tanggal 2 Oktober 1948 Asisten Wedono Manyaran Semin diserobot, sedang di Ponjong Penewu dngan juru tulisnya serta beberapa pegawai lainnya diculik oleh kaum pengacau. Untuk itu segera dikirim bantuan polisi mengatasi keadaan di Ponjong tersebut.

Pertempuran seru antara kaum pembeontak dengan pasukan MA di Pracimantoro dimana kekuasaan tentara pengacau tersebut berkekuatan kurang lebih 400 orang, sedang di pihak pemerintah tidak seimbang dengan mereka. Oleh karena itu diatur siasat mundur sampai di Semanu karena ada kekhawatiran diputus musuh di Bedoyo. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak jatuh korban, seorang MA gugur, sedang pihak musuh 3 orang. Sejak itulah perhatian dari Yogyakarta semakin besar dan dikirim tentara serta polisi terus mengalir. Penculikan terhadap Penewu Nglipar berkat kegesitan alat negara dan mendapat bantuan rakyat dapat meloloskan diri dari tahanan mereka. Daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum pengacau dapat direbut kembali.

Peristiwa yang kaitannya dengan pemberontakan PKI di berbagai tempat silih berganti. Baron, suatu daerah ujung tenggara Wonosari dan berbatasan dengan Wonosari menjadi genting, sehingga hal itu mengharuskan pengiriman bantuan polisi dan tentara dari Yogyakarta ke daerah tersebut. Semanu dijadikan markas pertahanan, demikian juga pasukan yang ditempatkan di Ngenep, sedang kekuatan yang lebih besar lagi ditempatkan di Semin. Berita lolosnya Penewu Ponjong dari sekapan pengacau bersamaan pegawai-pegawai membuat gembira penduduk di wilayah setempat. Namun, di Kabupaten Wonosari didatangi para pengungsi dari Pracimantoro dan Giritontro.

Dengan adanya berita pertumpahan darah di Kabupaten Gunung Kidul, maka pada tanggal 7 Oktober 1948 Sri Sultan datang k Wonosari. Setelah bupati menyampaikan laporan secara lisan Sri Sultan memerintahkan sebagai berikut :

1. Bupati diberi kekuasaan penuh untuk memilih dan mengisi semua lowongan pegawai sampai pangkat Panewu dan langsung bertugas, sedang surat keputusannya menyusul.
2. Daerah Surakarta yang terputus hubungannya dengan pusatnya supaya terus dipimpin untuk sementara dan dijamin pegawainya.

Berkat kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, tentara, dan rakyat, maka kaum pemberontak dari berbagai daerah dapat dipatahkan. Wuryantoro, Pracimantoro, dan Baturetno yang selalu menjadi sasaran pemberontak akhirnya dikuasai sehingga kaum pengacau dihalau menuju Pacitan. Sedang penangkapan terhadap orang-orang yang dipandang membahayakan berjalan terus. Bantuan dari Yogyakarta sejumlah 250 orang kekuatan angkatan bersenjata dan 12 orang mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

didatangkan ke Gunung Kidul. Dalam upaya penangkapan terhadap tokoh PKI ada juga yang dapat meloloskan diri.

Akibat Pemberontakan PKI

Akibat pemberontakan PKI Muso yang berpusat di Madiun itu, Kabupaten Gunung Kidul yang juga menjadi daerah pengaruh Front Demokrasi Rakyat suatu organisasi yang berbau komunis itu akhirnya mengalami kerugian besar di kalangan pegawai.

Dilaksanakanlah perubahan di kalangan Pamong Praja. Pembentukan Detasemen Polis Pamong Praja di setiap kecamatan diperintahkan agar sudah terbentuk pada tanggal 1 Desember 1948. Namun hal itu mengalami kesulitan yang besar tentang penempatan tenaga dan jaminannya, sehingga terpaksa mundur dan baru terlaksana pada tanggal 1 Januari 1949. Kekuatan angkatan bersenjata yang telah melaksanakan tugasnya mengamankan Gunung Kidul dari ancaman PKI telah ditarik kembali ke kesatuannya.

Keadaan ekonomi akibat kekacauan yang didalangi PKI itu membawa ke suasana kocar-kacir. Beras boleh dikatakan tidak ada karena dikuras ketika aksi PKI Muso. Jawatan PPBM (Pengumpulan dan Pembagian Bahan Makan) ternyata tidak ada gunanya, bahkan sering menimbulkan kegelisahan. Dalam waktu panen PPBM ternyata hanya dapat mengumpulkan gapek kurang lebih 150 ton dengan harga di atas umum, yaitu Rp. 1500,- per ton, sedangkan harga pasaran paling tinggi adalah Rp. 1400,-.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa Gunung Kidul penting untuk rakyat, yaitu perlunya ada *tandon* gapek sebagai persediaan musim paceklik yang menimpa masyarakat setempat dalam bulan Desember, Januari, Februari, serta bulan maret bahkan kadang-kadang sampai dengan bulan April, maka bupati sebagai Kepala Daerah dan Ketua MPK (Markas Pertahanan dan Keamanan) memberi penerangan kepada para pengusaha dagang Tionghoa dan Indonesia agar mereka suka mengadakan *tandon* gapek untuk kepentingan rakyat yang akan diberi izin oleh bupati. Anjuran ini mendapat tanggapan baik dan sampai akhir bulan Agustus 1948 dapat terkumpul seluruhnya \pm 2000 ton gapek. Kemudian keluarlah maklumat No. 29 Jawatan PPBM. Berdasarkan maklumat tersebut PPBM menjadi jawatan yang berkuasa terhadap masalah bahan makanan. Untuk menghimpun bahan makanan di Gunung Kidul semua usaha yang bergerak dalam bidang itu harus mendaftarkan diri di PPBM. Dengan cara demikian itu pemerintah dapat mengawasi sepenuhnya, dan bilamana ada keperluan lain dapat ditinjau kembali, misalnya ada serbuan mendadak dari Belanda ke Gunung Kidul. Sehubungan dengan pengaruh PKI masih menjiwai petugas PPBM maka seharusnya *tandon* gapek berjumlah \pm 2000 ton, tetapi berkurang 835 ton.

Di samping mengadakan usaha *tandon* gapek, maka dengan jalan mengadakan penerangan rakyat digerakkan memperhebat penanaman ketela pohon dan jagung. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1948 di Gunung Kidul terdapat tanaman ketela pohon seluas 36.000 ha dan jagung 20.000 ha yang merata di seluruh wilayah/kapanewon, sedang tahun sebelumnya hanya ada 28.000 ha dan 12.000 ha. Dengan demikian *tandon* bahan makan yang terpendam cukup menggembirakan.

Sumber : Suratmin, dkk., *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan : Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta : 1992.